

**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
(RANKHIR RENJA PD)
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG**

**Jl. Jenderal Hariyono No. 160 Tlp. / Fax. (0334)
887467**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja 2025 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2025 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjagasehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Kerja ini. Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan.

Lumajang,

2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris,



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

NIP. 198807122007011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat31

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah40

3.3 Program dan Kegiatan.....41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 71

BAB V PENUTUP..... 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian, Rencana Kerja pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategi PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Rencana Kerja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan rencana kinerja tahun 2025 didasarkan pada berbagai aspek konstitusional sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- j. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - t. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 - u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - v. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPD;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- hh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan

- Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- jj. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru
 - kk. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - ll. SKB 4 Menteri Tahun 2012 Tentang Percepatan PUD
 - mm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 - nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
 - oo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pupau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
 - pp. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
 - qq. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
 - rr. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - ss. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
 - tt. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender
 - uu. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
 - vv. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2025 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Tujuan Rencana Kerja adalah:

1. Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :
2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.6	Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah terdapat pada tc 29 di bawah ini :

T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja										
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7	11=(10/4)
1.05.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
1.05.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 laporan	100%

1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang /24 bulan	36 orang/12 bulan	36 orang/12 bulan	36 orang/12 bulan	100%	36 orang/12 bulan	72 orang /24 bulan	100%
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
01-05-01-2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 laporan	100%
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	36 laporan	100%
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 paket	25 paket	25 paket	25 paket	100%	2 paket	50 paket	100%
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	100%
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	4 paket	100%
1.05.001.2.06.09	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 laporan	45 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	57 laporan	100%

1.05.001.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	22 unit	22 unit	0 unit	1 unit	100%	2 unit	22 unit	100%
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 unit	33 unit	40 unit	40 unit	100%	40 unit	73 unit	100%
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	10 unit	100%
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	159%	159%	N/A	159%	159%
1.05.002.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	425 kasus	365 kasus	60 kasus	60 kasus	100%	N/A	425 kasus	100%
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	3317 kasus	476 kasus	2841 kasus	2841 kasus	100%	N/A	3317 kasus	100%
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
1.05.002.2.01.04	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 orang		80 orang	80 orang	100%	80 orang	80 orang	100%
1.05.002.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%

1.05.002.2.02	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
1.05.002.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
1.05.002.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
1.05.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.004.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%

1.05.004.2.01.0 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	8 unit	100%
1.05.004.2.01.0 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27 orang	27 orang	27 orang	0	100%	40 orang	27 orang	100%

**Analisis Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%) Akumulasi 2022-2023	Status Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
01-05-01-2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
01-05-01-2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%) Akumulasi 2022-2023	Status Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Keterangan
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.06.09	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%) Akumulasi 2022-2023	Status Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Keterangan
		yang Disediakan						
1.05.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100%	Tercapai	Kegiatan Rutin			
1.05.002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	159%	Melampaui	banyaknya pelanggaran di benner yang disebabkan tahun 2023 adalah tahun persiapan politik			
1.05.002.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Tercapai	fromula perhitungan adalah penanganan pengaduan dan semua pengaduan tertangani			
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%	Tercapai	realisasi jumlah kasus sesuai target			
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	100%	Tercapai	realisasi jumlah kasus sesuai target yang ditentukan			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%) Akumulasi 2022-2023	Status Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Keterangan
	Kerusuhan Massa	Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan						
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100%	Tercapai	realisasi jumlah dokumen sesuai target yang ditentukan			
1.05.002.2.01.04	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Tercapai	realisasi jumlah dokumen sesuai target yang ditentukan			
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	Tercapai	realisasi jumlah SDM yang telah ditingkatkan sesuai target yang ditentukan			
1.05.002.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	100%	Tercapai	realisasi jumlah dokumen sesuai target yang ditentukan			
1.05.002.2.02	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%	Tercapai	Realisasi Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan sesuai target yang ditentukan			
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	100%	Tercapai	realisasi jumlah laporan sesuai target yang			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%) Akumulasi 2022-2023	Status Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Keterangan
		kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha			ditentukan			
1.05.002.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	Tercapai	realisasi jumlah laporan sesuai target yang ditentukan			
1.05.002.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100%	Tercapai	realisasi jumlah laporan sesuai target yang ditentukan			
1.05.004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	Tercapai	pengaduan kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran tertangani semua			
1.05.004.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100%	Tercapai	Semua kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota terlaksanakan sesuai target yang ditentukan			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%) Akumulasi 2022-2023	Status Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Keterangan
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Tercapai	Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota terlaksanakan sesuai target yang ditentukan			
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100%	Tercapai	Telah tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri sesuai target yang ditentukan			
1.05.004.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100%	Tercapai	semua aparatur telah mengikuti bimtek peadam kebakaran di tahun 2023			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2020.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi pamong Praja
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target P- Renstra PD	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian P- Renstra PD	Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Indek Kepuasan Masyarakat</i>			83,50%	N/A	N/A	N/A	83,8	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase Penegakan Perda/Perkada			85%	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	
3	Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)			75%	N/A	N/A	N/A	70,7	N/A	N/A	N/A	
4	Indeks resiko bencana											
5	Indeks rasa aman				Aman (50,01-75)	Aman (50,01-75)	Aman (50,01-75)	N/A	Aman (50,01-75)	Aman (50,01-75)	Aman (50,01-75)	
6	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum				1,89%	2%	2,15%	N/A	0,38%	2%	2,15%	Realisasi sampai dengan TW II 2024

7	Persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia				1,86%	1,90%	1,94%	N/A	0,76%	1,90%	1,94%	Realisasi Sampai dengan TW II 2024
8		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
9		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	71%	71%	71%	71%	1. Belum terbentuknya WMK (Wilayan Manajemen Kebakaran) 2. Belum terbentuknya relawan Pemadam Kebakaran
10			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua pengaduan terselesaikan
11			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	19%	100%	21%	22%	terdapat 85 perda/perkada yang memuat sanksi dan 26 perda yang ditegakan Satpol PP

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang/kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diidentifikasi. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja. Melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan 4 strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini. Pertama, adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, adalah strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga, adalah strategi S-T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasitantang. Keempat, strategi W-T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan.

Analisa SWOT

a. Kekuatan (*strengths*)

- Tata kelola manajemen yang baik
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dan bersinergi dengan jajaran samping
- Kesiapsiagaan dan ketepatan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kejadian kebakaran
- Sosialisasi dan inspeksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran kepada masyarakat

b. Kelemahan (*weaknesses*)

- Minimnya kegiatan sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat
- sarana dan prasarana belum sesuai SPM
- Jumlah SDM belum sesuai kebutuhan berdasar Permendagri No 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- Adanya Perda/Perkada yang tidak memuat sanksi hukum, sampai sekarang Perda Trantibum belum disahkan
- minimnya pemahaman masyarakat terkait perda/perkada
- Belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran,

- Regulasi terkait regulasi aturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak relevan lagi
- Kurangnya personil PPNS
- Koordinasi antar instansi pemangku perda/perkada
- Kegiatan peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas
- Kurangnya koordinasi dan pemberdayaan antara Linmas Satpol PP dan Linmas desa lebih dimaksimalkan
- Rasa kurang peduli bagi OPD pemangku perda/perkada
- Minimnya anggaran

c. Kesempatan (*opportunities*)

Kesempatan disini adalah dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dengan maksimal

d. Ancaman (*threats*)

Ancaman disini adalah tidak dapat terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, antara lain:

- Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- Masih banyaknya masyarakat melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi
- Masih terjadi penanganan kejadian kebakaran tidak sesuai *respon time*

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana kerja Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang

T-C.31
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	7	8	9	10	11	12
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kab.Lumajang			12.914.610.518	
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	5.856.053.249	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lumajang	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	11.773.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.114.500	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.302.500	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	-	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.356.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.515.827.162	

1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ 12 bulan	4.461.707.162	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	49.800.000	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.280.000	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	1.040.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	198.537.304	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	9.145.734	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	90.789.145	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	11.890.425	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.712.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lumajang	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	568.881.000	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	240.000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	111.000.000	
1.02.01.2.08.0004	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	457.641.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lumajang	Persentase pemeliharaan BMD	100%	561.034.783	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	540.934.783	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133 unit	20.100.000	

1.05.004.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Lumajang	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	0,75%	6.231.068.810	
		Kab.Lumajang	Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum	1,72%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lumajang	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	59 kasus	3.313.120.500	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	7 dokumen	352.160.500	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	-	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan erlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Lumajang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213 orang	227.796.000	
1.05.02.2.01.0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	59 dokumen	809.975.000	
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 dokumen	135.000	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	96 laporan	588.960.000	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	48 laporan	1.331.644.000	

1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 laporan	2.450.000	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	12 unit	-	
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab.Lumajang	Jumlah penanagnan pelanggran perda/perkada sesuai SOP	2830 kasus	2.883.118.310	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 laporan	1.127.865.250	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	25 laporan	1.725.933.060	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 laporan	29.320.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab.Lumajang	persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	33%	34.830.000	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 laporan	34.830.000	
01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab.Lumajang	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	71%	827.488.459	
		Kab.Lumajang	Persentase cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia	100%		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lumajang	persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3	100%	772.976.459	

1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		-	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	621.132.000	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	1.280.000	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab.Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	223 unit	150.564.459	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab.Lumajang	persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart	100%	10.925.000	
1.05.04.2.02.0002	penilaian sarana dan prasaran proteksi kebakaran	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	54 dokumen	10.925.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Lumajang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4,88%	37.587.000	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		jumlah desa/kelurahan yang memiliki relawan pemadam kebakaran di bagi jumlah desa/kelurahan dikali 100%	500 orang	13.500.000	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab.Lumajang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/kelurahan	-	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Kab.Lumajang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	5 dokumen	24.087.000	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab.Lumajang	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia	100%	6.000.000	

1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab.Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	100 laporan	6.000.000	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab.Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 unit	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat Kecamatan yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

T.C.32
Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah, utamanya pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan salah satu indikatornya adalah penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Banyaknya Fenomena pelanggaran perda/perkada yang dilakukan masyarakat, pelaku usaha,

aparatur pemerintah maupun unsur lainnya, maka guna mewujudkan dan memenuhi target kinerja indikator yang ditetapkan tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja berinovasi sebagai berikut:

a. Satpol PP Ayo Main ke Sekolah;

1. Latar Belakang

Inovasi Satpol PP Ayo Main ke Sekolah dilatarbelakangi oleh maraknya kenakalan remaja, hal ini terbukti dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Satpol PP utamanya dari sekolah-sekolah maupun tertangkap tangan oleh Satpol PP terkait *bullying*, minol oplosan, Narkoba, asusila maupun kenakalan lain yang melanggar norma sekolah dan melanggar perda/perkada.

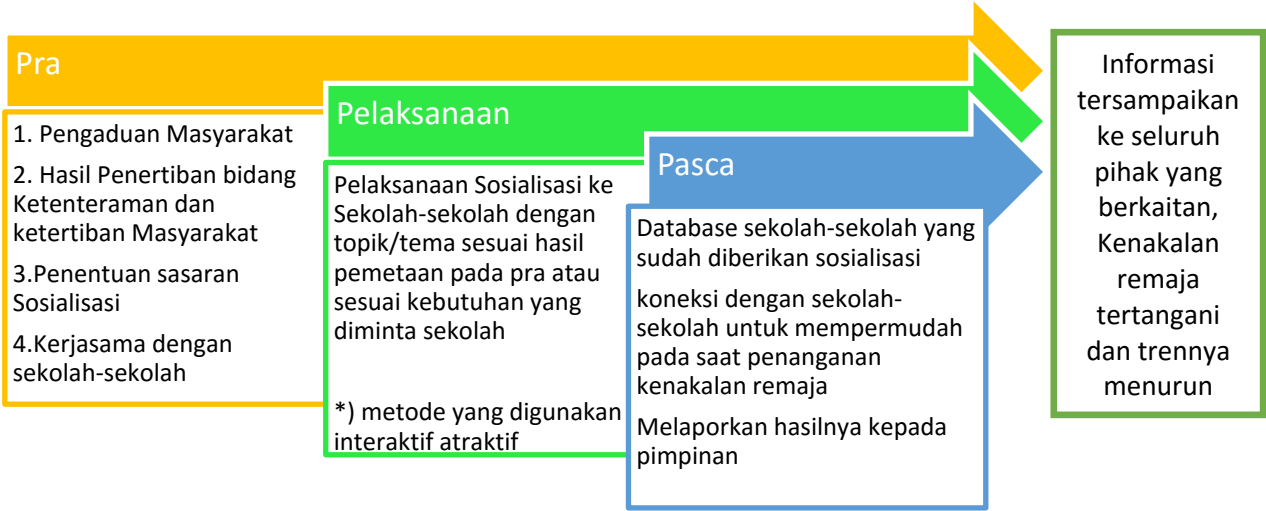
2. Tujuan

Memberikan pencerahan dan penyadaran kepada Siswa/Anak Usia Remaja dimulai dari lingkungan sekolah, pondok pesantren, serta menyamakan pemahaman guru agar diteruskan ke walimurid/walisantri agar diulas/dipedomani dan dilanjutkan dilingkungan keluarga untuk mengurangi bahkan memberantas kenakalan remaja dalam bentuk apapun.

3. Manfaat

- a. Memberikan informasi baru maupun merefresh informasi yang sudah ada guna menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang berdampak negatif bagi diri sendiri, nama baik keluarga maupun lingkungan sekitarnya;
- b. Memberikan informasi terkait saluran-saluran pengaduan dan penanganan kenakalan remaja agar tertangani tepat sasaran.

4. Alur Inovasi



5. Kendala

Pihak sekolah sudah terkoneksi dengan Satpol PP, namun lingkungan keluarga melakukan pembiaran/ menciptakan lingkungan yang negatif, maka kegiatan pencegahan akan menjadi sia-sia. Harapan satu-satunya adalah diri pribadi siswa yang sadar dan membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dengan terus didampingi oleh guru dan teman-teman yang positif.

b. Si Panda Merah (Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah)

1. Latar Belakang

Inovasi Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Si Panda Merah) dilatarbelakangi oleh urgensi meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang melalui salah satu upaya penegakan perda/perkada yakni preventif melalui kegiatan sosialisasi untuk percepatan informasi kepada wajib pajak maupun obyek retribusi daerah, agar memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

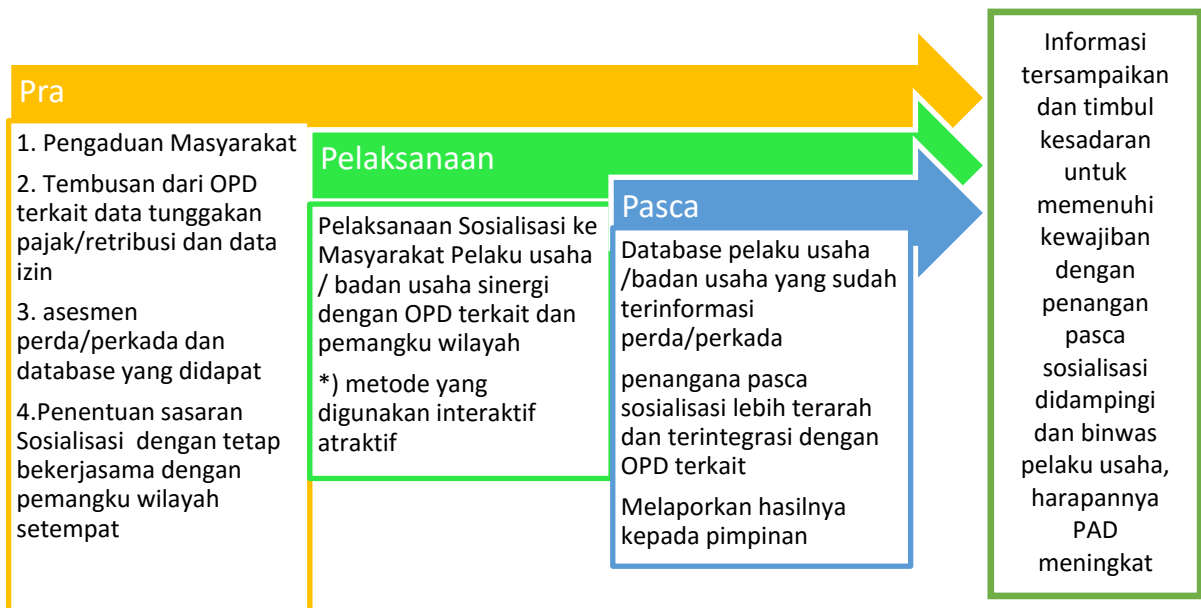
2. Tujuan

Mempercepat penyebaran informasi perda/perkada kepada perorangan maupun badan usaha guna menumbuhkan kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak maupun retribusi, dan yang tidak berizin usaha maupun kegiatannya dapat segera mengurus sesuai aturan yang berlaku.

3. Manfaat

- a. Menambah subyek/obyek pajak dan retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah;
- b. Masyarakat atau badan usaha memperoleh informasi update terkait perda/perkada yang berlaku.

4. Alur Inovasi



5. Kendala

1. Komitmen masyarakat atau badan usaha yang masih rendah terkait kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi, karena dianggap memberatkan.
2. Belum tumbuhnya tanggungjawab bersama untuk membangun Kabupaten Lumajang.

c. Si Panda Mesra (Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Meningkatkan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat)

1. Latar Belakang

Inovasi Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Meningkatkan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Si Panda Mesra) dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kriminalitas dan gangguan keterteraman dan ketertiban di masyarakat, maka perlu penegakan perda/perkada melalui salah satu upaya preventif yakni melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat, pemangku wilayah dan Linmas Desa/Kelurahan guna cegah dini.

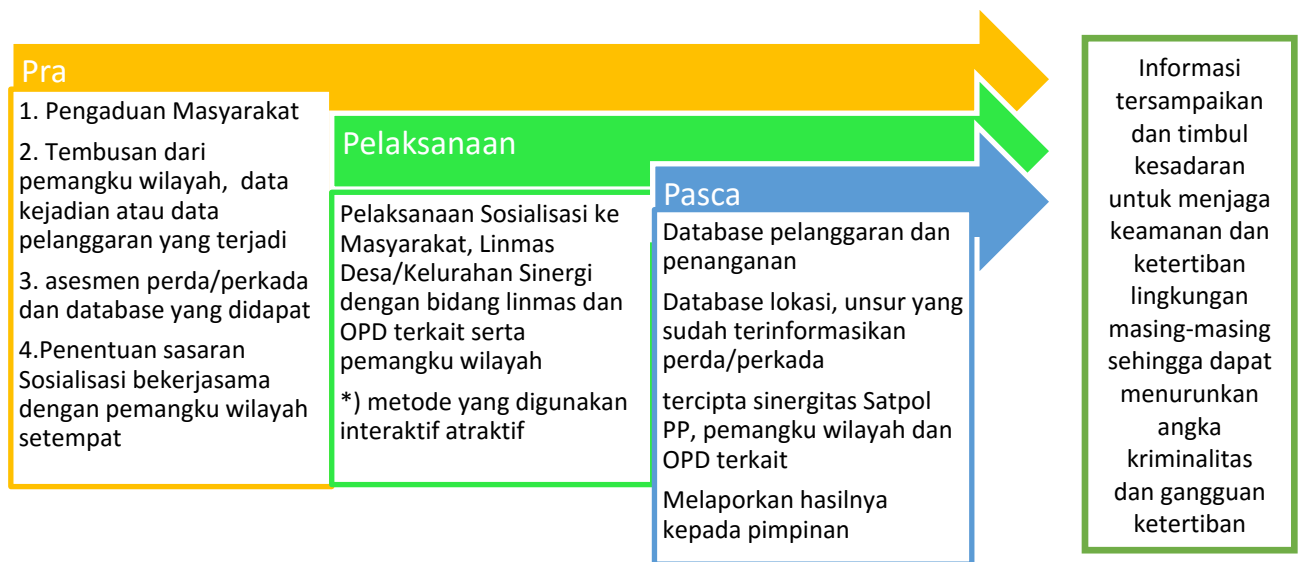
2. Tujuan

Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing, sehingga sama-sama menjaga tanpa harus menunggu aparat setempat, kecuali diperlukan penanganan lebih lanjut.

3. Manfaat

- a. Menekan angka kriminalitas melalui unsur terdekat yakni masyarakat yang solid;
- b. Terciptanya masyarakat yang sadar/ tidak apatis terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga lingkungan kondusif.

4. Alur Inovasi



5. Kendala

- a. Keterbatasan personil satpol pp untuk mengamankan wilayah se Kabupaten Lumajang, sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat, pemangku wilayah dan unsur lain;
- b. Belum terbangunnya sistem yang jelas, mulai dari proses awal, penanganan maupun penindakan dan proses pasca penindakan, utamanya pada proses pasca penindakan.

d. Waspada Pulsa (Pengawasan Pelaksanaan Perda/Perkada Pada Pelaku Usaha)

1.Latar Belakang

Inovasi pengawasan pelaksanaan Perda/Perkada pada pelaku usaha dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin sesuai aturan yang berlaku sehingga berdampak pada lingkungan sekitar, seperti pembuangan limbah hasil produksi yang sembarang, pemanfaatan tempat tidak sesuai ketentuan, serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat karena kegiatan yang dilakukan masih ilegal sehingga pengawasannya tidak ada.

2. Tujuan

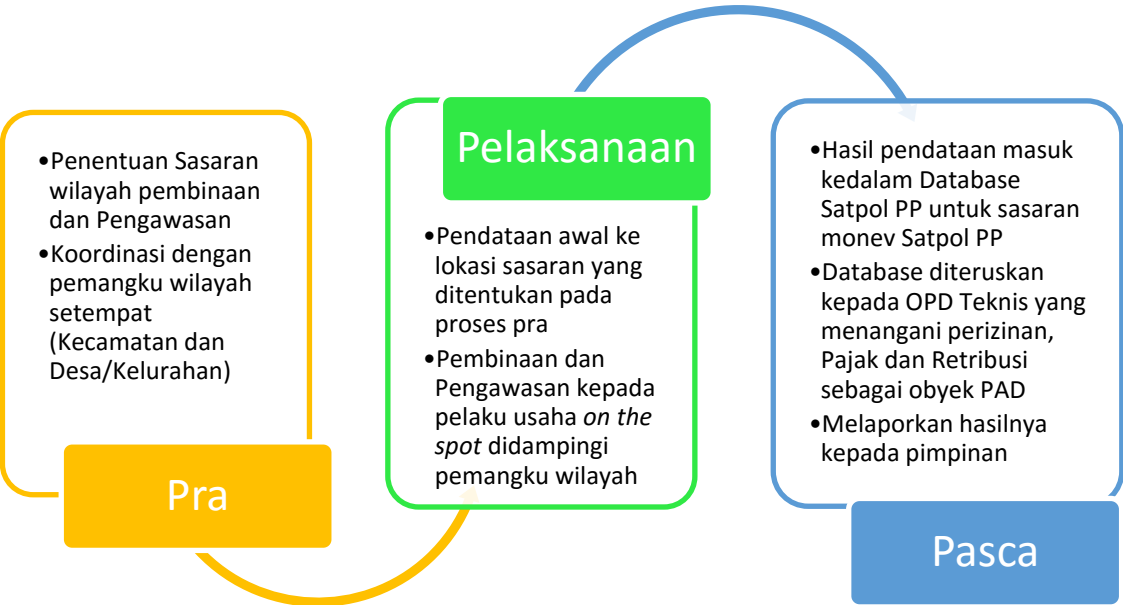
- a. Menggali informasi dan melakukan pendataan *on the spot* terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lumajang;
- b. Mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan;

- c. Cegah dini melalui pembinaan dan pengawasan pelaku usaha baik yang berizin guna meminimalisir permasalahan trantibum.

3. Manfaat

- a. Percepatan informasi perizinan kepada pelaku usaha agar segera mengurus izin usahanya sehingga mempunyai legalitas usaha yang jelas;
- b. Memperoleh database pelaku usaha yang ada diwilayah Kabupaten Lumajang sebagai obyek pembinaan dan pengawasan;
- c. Sinergi terbangun antara Satpol PP dengan Pemangku wilayah setempat dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha;
- d. Menambah PAD Kabupaten Lumajang melalui pembayaran pajak/kewajiban pelaku usaha yang sudah terdata izin.

4. Alur Inovasi



5. Kendala

Mayoritas pelaku usaha yang ditemukan *on the spot* belum berizin dengan alasan tidak tahu tata cara mengurus perizinan, dianggapnya susah dan berbelit-belit serta keterbatasan informasi sehingga takut biaya besar jika mengurus perizinan, untuk itu butuh pendampingan dari petugas.

e. Waspada Pemanis (Pengawasan Pelaksanaan Perda/Perkada Pada Penyandang Masalah Sosial Secara Humanis)

1. Latar Belakang

Inovasi Pengawasan Pelaksanaan Perda/Perkada Pada Penyandang Masalah Sosial Secara Humanis muncul dilatarbelakangi oleh semakin bertambahnya populasi Penyandang Masalah Sosial seperti anak jalanan, pengemis, ODGJ dll yang butuh penanganan secara masif dan humanis serta terintegrasi dengan OPD Teknis sehingga terukur dan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan seperti kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat serta mengentaskan secara perlahan-lahan tapi pasti orang-orang Penyandang Masalah Sosial.

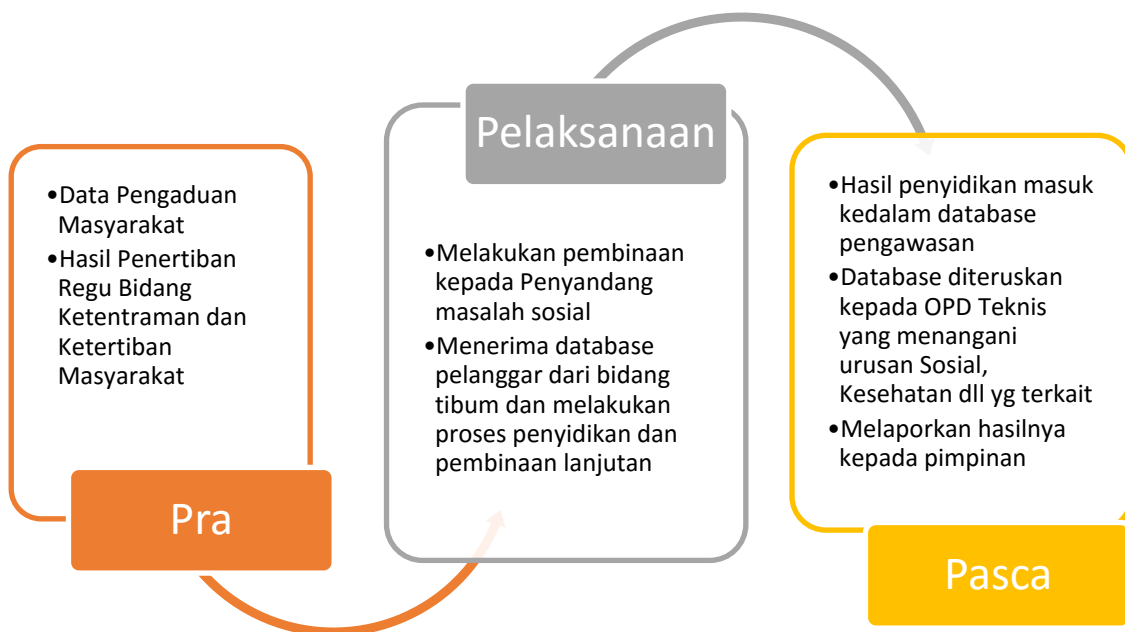
2. Tujuan

- a. Mengurangi populasi Penyandang Masalah Sosial secara berkala
- b. Mengurangi angka kriminalitas di lingkungan Masyarakat
- c. Memberikan rasa aman, nyaman dan tertib disekitar lingkungan Masyarakat

3. Manfaat

- a. Menciptakan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat;
- b. Memperoleh database sebagai obyek pembinaan dan pengawasan;
- c. Mengedukasi masyarakat utamanya Penyandang Masalah Sosial agar hidup lebih baik dan bermanfaat melalui intervensi pemerintah baik pembinaan dan pengiriman pelatihan pelatihan keterampilan kerja, dll.

4. Alur Inovasi



5. Kendala

- Masih terdapat ego sektoral antar OPD pelaksana yang termasuk dalam SOP penanganan penyandang masalah sosial.
- Penyandang masalah sosial tahun demi tahun akan bertambah jika tidak ada kesadaran Masyarakat akan pentingnya Akhlak dan Pendidikan yang timbul dari masing-masing individu, sehingga pembinaan dan pengawasan harus terus dilakukan, namun terbatasnya anggaran untuk pengiriman pelatihan perlu dicari jalan keluarnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perioritas pembangunan disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Perioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Memperkuat stabilitas POLHUKUM dan Transformasi pelayanan publik

B. Perioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

- Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
- Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan
- Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
- Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
- Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

- Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024

- Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian perindustrian dan pariwisata
- Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan
- Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
- Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar
- Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
- Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026 antara lain Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang antara lain Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Tabel 3.4 Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	8	9	10
Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan		Indeks resiko bencana	Angka	Ancaman x kerentanan di bagi kapasitas	110,73	105,03	107,86
		Indeks rasa aman	Predikat	Hasil Kajian Indeks Rasa Aman	Aman (50,01-75)	Aman (50,01-75)	Aman (50,01-75)
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum	%	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya kali 100%	1,89%	2%	2,15%
		persentase penurunan bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia	%	jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikurangi Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun tahun berjalan dibagi Jumlah kasus bencana kebakaran dan non kebakaran serta kondisi yang membahayakan manusia tahun sebelumnya dikali 100%	1,86%	1,9%	1,94%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk mendukung tercapainya Rencana Kerja Daerah pada umumnya dan Rencana. Adapun Program dan Kegiatan pada Tc.33 dibawah ini :

Tc- 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran program/kegiatan /sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Formulasi perhitungan	Aktivitas	Skala a Prioritas	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dan a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								12.914.610.518	DAU DAN DBH CHT	
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100			Satpol PP	100%	5.856.053.249	DAU	

1.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100			Satpol PP	100%	11.773.00 0	DAU	
1.02.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Satpol PP	2 dokume n	5.114.500	DAU	
					Penyusunan Renstra	1	Satpol PP	1 Dokume n	2.561.000	DAU	
					Penyusunan dokumen Renja	2	Satpol PP	1 dokume n	2.553.500		
					Penyusunan dokumen P-Renja	3	Satpol PP	1 dokume n	-		

1.02.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Satpol PP	1 Dokume n	4.302.500	DAU	
					Penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Satpol PP	1 dokume n	4.302.500	DAU	
1.05.001. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Satpol PP	2 dokume n	-		
					Penyusunan dokumen P-RKA SKPD dan Pergeseran	1	Satpol PP	2 Dokume n	-		

1.02.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Satpol PP	5 laporan	2.356.000	DAU	
					Pelaporan, LKJ TW 1,2 3,4 dan Lakip	1	Satpol PP	5 Dokume n	2.356.000	DAU	
1.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100			Satpol PP	100%	4.515.827 .162	DAU	
1.02.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Satpol PP	35 orang/ 1 2 bulan	4.461.707. 162	DAU	
					Gaji Pokok PNS	1	Satpol PP	35 orang/ 1 2 bulan	2.831.155. 120	DAU	

					Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2	Satpol PP	35 orang/1 2 bulan	1.630.552. 042	DAU	
1.02.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Satpol PP	12 Dokume n	49.800.00 0	DAU	
					honorarium pengelola keuangan	1	Satpol PP	12 Dokume n	49.800.00 0	DAU	
1.02.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Satpol PP	1 laporan	3.280.000	DAU	
					Penyusunan laporan keuangan	1	Satpol PP	1 laporan	3.280.000	DAU	

1.02.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD			Satpol PP	12 laporan	1.040.000	DAU	
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	1	Satpol PP	12 laporan	1.040.000	DAU	
1.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dikali 100			Satpol PP	100%	198.537.3 04	DAU	

1.02.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan			Satpol PP	2 paket	9.145.734	DAU	
					Penyediaan komponen listrik	1	Satpol PP	2 paket	9.145.734	DAU	
1.02.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Satpol PP	3 paket	90.789.14 5	DAU	
					Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1	Satpol PP	12 jenis	7.522.803	DAU	
					Penyediaan Alat Tulis kantor	3	Satpol PP	66 jenis	81.466.34 2	DAU	
					Penyediaan benda pos	4	Satpol PP	60 lbr	1.800.000	DAU	
1.02.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Satpol PP	2 paket	11.890.42 5	DAU	
					Penyediaan barang cetak	1	Satpol PP	3 jenis	3.127.425	DAU	
					penggandaan	2	Satpol PP	2 jenis	8.763.000	DAU	
1.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Satpol PP	12 laporan	86.712.00 0	DAU	

					Perjalanan dinas luar daerah	1	Satpol PP	12 laporan	86.712.000	DAU	
					Makan minum rapat koordinasi	2	Satpol PP	12 laporan	-		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100			Satpol PP	100%	568.881.000	DAU	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Satpol PP	12 laporan	240.000	DAU	
					Penyediaan jasa kirim laporan provinsi	1	Satpol PP	12 laporan	240.000	DAU	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Satpol PP	12 laporan	111.000.000	DAU	
					Penyediaan jasa telepon	1	Satpol PP	12 rekening	2.400.000	DAU	
					Penyediaan jasa air	2	Satpol PP	12 rekening	9.600.000	DAU	

					Penyediaan jasa listrik	3	Satpol PP	12 rekening	99.000.000	DAU	
							Satpol PP			DAU	
1.02.01.2.08.0004	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Satpol PP	12 laporan	457.641.000	DAU	
					Pembayaran Upah TKB administrasi	1	Satpol PP	8 TKB	163.200.000	DAU	
					Pembayaran Upah TKB Kebersihan	2	Satpol PP	1 TKB	18.000.000	DAU	
					Pembayaran retribusi sampah	3	Satpol PP	12 laporan	960.000	DAU	
					Penyediaan jasa jaminan asuransi	4	Satpol PP	12 laporan	275.481.000	DAU	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100			Satpol PP	100%	561.034.783	DAU	

1.02.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Satpol PP	41 unit	540.934.783	DAU	
					Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	1	Satpol PP	22.650 liter	216.237.800	DAU	
					Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2	Satpol PP	38 kali	119.881.240	DAU	
					Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	3	Satpol PP	30 unit	56.215.710	DAU	
					Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus	4	Satpol PP	2 unit	148.600.033	DAU	
1.02.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Satpol PP	133 unit	20.100.000	DAU	
					Pemeliharaan alat kantor (AC)	1	Satpol PP	6 unit	3.600.000	DAU	
					Pemeliharaan alat studio (HT)	2	Satpol PP	11 unit	3.000.000	DAU	
					Pemeliharaan komputer dan printer	3	Satpol PP	20 unit	13.500.000	DAU	

1.05.004. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Satpol PP	1 unit	-	DAU	
					paving	1	Satpol PP	400 M ²	-	DAU	
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100%			Kab.Lu majang	2,09	6.231.068.810	DAU DAN DBH CHT	SPM
			Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum	Jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun berjalan dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya kali 100%			Kab.Lu majang	1,72		DAU	
1.05.02.2 .01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum			Kab.Lu majang	59 kasus	3.313.120.500	DAU	

1.05.02.2 .01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Kab.Lu majang	2 dokume n	352.160.500	DAU	
					Pembayaran Upah Tenaga TKB	1	Kab.Lu majang	17 TKB	346.800.000	DAU	
					Patroli PILKADES Tahun 2025	2	Kab.Lu majang	14 kegiatan	-	DAU	
					PATROLI SIJALINMAJATAR U 2025	4	Kab.Lu majang	1 Kegiata n	1.272.000	DAU	
					Sosialisasi SIM LINMAS tingkat desa	5	Kab.Lu majang	1 kegiatan	4.088.500	DAU	
1.05.02.2 .01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kab.Lu majang	2 dokume n	-	DAU	

					Lomba Kelompok Siskamling Tingkat Kabupaten	1	Kab.Lu majang	1 kegiatan	0	DAU	
					Jambore SATLINMAS tingkat propinsi	2	Kab.Lu majang	18 Peserta	-	DAU	
1.05.02.2 .01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kab.Lu majang	213 orang	227.796.000	DAU	
					Pembayan Upah TKB	1	Kab.Lu majang	4 orang	81.600.000	DAU	
					HUT Satpol PP Tingkat Jawa Timur	2	Kab.Lu majang	1 kegiatan	122.776.000	DAU	
					Pataka jer basuki mawa beya	3	Kab.Lu majang	1 kegiatan	9.020.000	DAU	
					Jambore Satpol PP Jawa Timur	4	Kab.Lu majang	1 kegiatan	-	DAU	
					Kesemaptan rutin	5	Kab.Lu majang	12 kegiatan	14.400.000	DAU	

1.05.02.2 .01.0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Kab.Lu majang	59 dokume n	809.975.0 00	DAU	
					Pembayaran upah TKB	1	Kab.Lu majang	33 orang	673.200.0 00	DAU	
					Gelar Pasukan Pengamanan PILKADES serentak	2	Kab.Lu majang	21 kecamat an	-	DAU	AP
					Rangkaian Pengamanan PILKADES serentak	3	Kab.Lu majang	50 dokume n	-	DAU	AP
					Operasi Tempat- Tempat Rawan Asusila	4	Kab.Lu majang	24 dokume n	30.970.00 0	DAU	
					Operasi Tempat- Tempat Rawan Begal dan Pencurian Hewan	5	Kab.Lu majang	24 dokume n	25.850.00 0	DAU	
					Pengamanan Hari Besar Keagamaan, Malam Takbir dan Tahun Baru	6	Kab.Lu majang	1 dokume n	9.375.000	DAU	

					PAM HARI BESAR KEAGAMAAN OPS. KETUPAT SEMERU DAN OPS. LILIN SEMERU	7	Kab.Lu majang	8 dokume n	66.880.00 0	DAU	
					Hari raya agama Hindu	8	Kab.Lu majang	1 dokume n	3.600.000	DAU	
					Penyelesaian laporan kegiatan	9	Kab.Lu majang	1 dokume n	100.000	DAU	
					Rapat Koordinasi Persipan Pengamanan Pilkades (Forkopimda dan Forkopimca)	10	Kab.Lu majang	1 kegiatan	-	DAU	AP
1.05.02.2 .01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			Kab.Lu majang	12 dokume n	135.000	DAU	
					penyusunan SOP Trantibum	1	Kab.Lu majang	12 dokume n	135.000	DAU	

1.05.02.2 .01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Kab.Lu majang	96 laporan	588.960.000	DAU	
					Upah TKB	1	Kab.Lu majang	25 orang	510.000.000	DAU	
					Honor PPTK	2	Kab.Lu majang	12 bulan	-	DAU	
					Pengamanan dan pengawalan pejabat	3	Kab.Lu majang	12 kali	15.360.000	DAU	
					Patroli wilayah deteksi dini, cegah dini	4	Kab.Lu majang	12 kali	15.360.000	DAU	
					pam CFN dan CFD	5	Kab.Lu majang	48 kali	36.000.000	DAU	
					Penertiban reklame layanan umum	6	Kab.Lu majang	12 kali	11.520.000	DAU	
					Penyelesaian laporan kegiatan	7	Kab.Lu majang	12 laporan	720.000	DAU	

1.05.02.2 .01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Kab.Lu majang	48 laporan	1.331.644. 000	DAU	
					Pembayaran Upah TKB	1	Kab.Lu majang	53 orang	1.081.200. 000	DAU	
					Pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa	2	Kab.Lu majang	6 kegiatan	19.200.00 0	DAU	
					Honor Sekretariat Tim Satgas Pasir			12 kegiatan	16.200.00 0		
					Pencegahan kepada penambang yang tidak memiliki perijinan pertambangan/st ockpile/SKAB (Pokja Preventif) Satgas Pasir	3	Kab.Lu majang	12 kegiatan	26.080.00 0	DAU	

					Penyelidikan, penyidik dan penindakan kepada penambang yang tidak memiliki perijinan pertambangan/st ockpile/SKAB (Pokja Represif) Satgas Pasir	4	Kab.Lu majang	12 kegiatan	19.560.000	DAU	
					Honorarium Tim Satgas Pasir	5	Kab.Lu majang	12 bulan	162.600.000	DAU	
					Honorarium PPTK	6	Kab.Lu majang	12 bulan	6.804.000		
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			Kab.Lu majang	8 laporan	2.450.000	DAU	
					Pelayanan Kerugian Materil	1	Kab.Lu majang	1 paket	1.600.000	DAU	SPM
					pelayanan pengobatan	2	Kab.Lu majang	1 orang	850.000	DAU	SPM
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang			Kab.Lu majang	12 unit	-	DAU	

	Ketertiban Umum	Umum	Tersedia	Tersedia							
					Sarpras Trantibum sesuai SPM	1	Kab.Lu majang	12 unit	-	DAU	AP DAN SPM
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada sesuai SOP	Jumlah penanagnan pelanggaran perda/perkada sesuai SOP			Kab.Lu majang	2830 kasus	2.883.118.310	DAU	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Kab.Lu majang	24 laporan	1.127.865.250	DAU	
					Upah TKB	1	Kab.Lu majang	2 Orang	40.800.000	DAU	
					Satpol PP Ayo Main ke Sekolah	2	Kab.Lu majang	2 Kali	5.342.500	DAU	
					Si Panda Merah (Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah)	3	Kab.Lu majang	0 Kali	-	DAU	

					Si Panda Mesra (Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Meningkatkan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat)	4	Kab.Lu majang	2 Kali	6.338.500	DAU	
					Sosialisasi Masyarakat di Kecamatan	5	Kab.Lu majang	4 Kali	319.588.2 50	DBH CHT	
					Ekspose Hasil Operasi	6	Kab.Lu majang	2 Kali	157.990.0 00	DBH CHT	
					Karnaval Gempur Rokok Ilegal	7	Kab.Lu majang	1 Kali	229.206.0 00	DBH CHT	
					Gelar Budaya Gempur Rokok Ilegal	8		4 Kali	368.600.0 00	DBH CHT	
1.05.02.2 .02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			Kab.Lu majang	25 laporan	1.725.933. 060	DAU	
					Upah TKB	1	Kab.Lu majang	4 Orang	81.600.00 0	DAU	
					Honorarium PPTK	2	Kab.Lu majang	1 Orang	1.912.000	DAU	

					Tindaklanjuti Hasil Operasi	3	Kab.Lu majang	12 Kegiatan	21.996.000	DAU	
					Beracara Tindak Pidana Ringan	4	Kab.Lu majang	2 kali	6.980.000	DAU	
					Penggalian Informasi BKC Ilegal	5	Kab.Lu majang	120 Kali	321.600.000	DBH CHT	
					Operasi Bersama Pemberantasan BKC Ilegal	6	Kab.Lu majang	100 Kali	1.178.463.000	DBH CHT	
					Belanja Modal	7	Kab.Lu majang	13 Unit	113.382.060	DBH CHT	
1.05.02.2 .02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Kab.Lu majang	24 laporan	29.320.000	DAU	
					Upah TKB	1	Kab.Lu majang	1 Orang	20.400.000	DAU	
					Waspada Pulsa (Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pada Pelaku Usaha)	2	Kab.Lu majang	2 Kegiatan	8.920.000	DAU	

					Waspada Pemanis (Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pada Penyandang Masalah Sosial Secara Humanis)	3	Kab.Lu majang	0 Kegiata n	-	DAU	
1.05.02.2 .03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	jumlah PPNS yang telah dibina di bagi jumlah seluruh PPNS dikabupaten dikali 100%			Kab.Lu majang	33%	34.830.00 0	DAU	
1.05.02.2 .03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			Kab.Lu majang	3 laporan	34.830.00 0	DAU	
					Fasilitasi Pengiriman Peserta Diklat PPNS	1	Kab.Lu majang	1 Orang	34.830.00 0	DAU	
01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate dibagi Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N dikali 100%			Kab.Lu majang	71%	827.488.4 59	DAU	SPM

			Persentase cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia	jumlah kejadian non kebakaran dan jumlah kejadian yang membahayakan manusia yang di tangani di bagi jumlah kejadian non kebakaran dan jumlah kejadian yang membahayakan manusia dikali 100%			Kab.Lu majang	100%		DAU	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3	jumlah kejadian kebakaran dan B3 yang di tangani di bagi jumlah kejadian kebakaran dan B3 yang dilaporkan dikali 100%			Kab.Lu majang	100%	772.976.459	DAU	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			Kab.Lu majang	10 dokumen	-	DAU	belum di rubah di data dukung

					penyusunan SOP	1	Kab.Lu majang	10 dokume n	-		
1.05.04.2 .01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab.Lu majang	100 laporan	621.132.0 00	DAU	
					Upah TKB	1	Kab.Lu majang	23 orang	469.200.0 00	DAU	
					Melaksanakan pemadaman kebakaran sesuai permohonan/ pelaporan badan usaha dan perorangan	2	Kab.Lu majang	100 kali	151.932.0 00	DAU	
1.05.04.2 .01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Ev akuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Ev akuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Ev akuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			Kab.Lu majang	12 Dokume n	1.280.000	DAU	

					Evakuasi dan pertolongan pertama (P3K) pada Korban Kebakaran dan non kebakaran	1	Kab.Lu majang	12 Dokumen	1.280.000	DAU	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			Kab.Lu majang	223 unit	150.564.459	DAU	
					Pengadaan sarana dan prasarana dan alat pelindung diri bagi petugas damkar	1	Kab.Lu majang	223 unit	150.564.459	DAU	AP
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart	Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang di inspeksi sesuai stadart dibagi jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang tersedia dikali 100%			Kab.Lu majang	100%	10.925.000	DAU	

1.05.04.2 .02.0002	penilaian sarana dan prasaran proteksi kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedun g/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedun g/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab.Lu majang	54 dokume n	10.925.00 0	DAU	
					pembuatan Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	Kab.Lu majang	54 dokume n	10.925.00 0	DAU	
1.05.04.2 .04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	jumlah desa/kelurahan yang memiliki relawan pemadam kebakaran di bagi jumlah desa/kelurahan dikali 100%			Kab.Lu majang	4,88%	37.587.00 0	DAU	

1.05.04.2 .04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			Kab.Lu majang	500 orang	13.500.000		
					Sosialisasi Pemadam Kebakaran kepada pelajar dan anak usia dini	1	Kab.Lu majang	500 orang	13.500.000	DAU	
							Kab.Lu majang				
1.05.04.2 .04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			Kab.Lu majang	5 desa/ke lurahan	-	DAU	

					Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran di lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	1	Kab.Lu majang	35 orang	-	DAU	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar			Kab.Lu majang	5 dokumen	24.087.000	DAU	Untuk Pendampingan Dana DAK Tematik PPKT
					Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada masyarakat	1	Kab.Lu majang	5 dokumen	24.087.000	DAU	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia	jumlah kasus kondisi membahayakan manusia yang tertangani di bagi jumlah kasus kondisi membahayakan manusia di kali 100 %			Kab.Lu majang	100%	6.000.000	DAU	

1.05.04.2 .05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			Kab.Lu majang	100 laporan	6.000.000	DAU	
-----------------------	--	--	---	---	--	--	------------------	----------------	-----------	-----	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel. Program Utama dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12.914.610.518	DAU DAN DBHCHT
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	5.856.053.249	DAU
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	11.773.000	DAU
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.114.500	DAU
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.302.500	DAU
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	0	DAU
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.356.000	DAU
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.515.827.162	DAU
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ 12 bulan	4.461.707.162	DAU

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	49.800.000	DAU
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.280.000	DAU
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 dokumen	1.040.000	DAU
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	198.537.304	DAU
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	9.145.734	DAU
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	90.789.145	DAU
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	11.890.425	DAU
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.712.000	DAU
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	568.881.000	DAU
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	240.000	DAU
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	111.000.000	DAU
21	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	457.641.000	DAU
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100%	561.034.783	DAU
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	540.934.783	DAU
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	133 unit	20.100.000	DAU

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
		yang Dipelihara			
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	DAU
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	2,09%	6.231.068.810	DAU DAN DBHCHT
27		Persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum	1,72%		DAU
28	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	59 kasus	3.313.120.500	DAU
29	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 dokumen	352.160.500	DAU
30	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	0	DAU
31	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan erlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213 orang	227.796.000	DAU
32	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	59 dokumen	809.975.000	DAU
33	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 dokumen	135.000	DAU
34	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	36 laporan	588.960.000	DAU

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
35	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	48 laporan	1.331.644.000	DAU
36	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 laporan	2.450.000	DAU
37	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	12 unit	0	DAU
38	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penanagnan pelanggran perda/perkada sesuai SOP	2830 kasus	2.883.118.310	DAU DAN DBHCHT
39	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 laporan	1.127.865.250	DAU DAN DBHCHT
40	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	25 laporan	1.725.933.060	DAU DAN DBHCHT
41	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 laporan	29.320.000	DAU
42	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	33%	34.830.000	DAU
43	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 laporan	34.830.000	DAU
44	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	71%	827.488.459	DAU
45		Persentase cakupan pelayanan penanggulangan non kebakaran dan kondisi yang	100%		DAU

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
		membahayakan manusia			
46	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase penanganan kejadian kebakaran dan penanganan B3	100%	772.976.459	DAU
47	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 dokumen	0	DAU
48	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	621.132.000	DAU
49	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	1.280.000	DAU
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	223 unit	150.564.459	DAU
51	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	persentase ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran sesuai standart	100%	10.925.000	DAU
52	penilaian sarana dan prasaran proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	54 dokumen	10.925.000	DAU
53	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4,88%	37.587.000	DAU
54	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah desa/kelurahan yang memiliki relawan pemadam kebakaran di bagi jumlah desa/kelurahan dikali 100%	500 orang	13.500.000	DAU

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
55	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/kelurahan	0	DAU
56	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 dokumen	24.087.000	DAU
57	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kasus kondisi membahayakan manusia	100%	6.000.000	DAU
58	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	100 laporan	0	DAU
59	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 unit	8.420.000	DAU

Total pagu anggaran sebesar Rp 12.914.610.518, terdiri dari dana DAU sebesar Rp 10.225.781.208 dan dana DBHCHT sebesar Rp 2.688.829.310

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026. Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2025.

Besar harapan kami agar anggaran Rencana kerja di atas bisa terealisasi 100%, mengingat tahun 2025, dimana sebagian besar anggaran tersebut adalah gaji PNS, gaji TKB, anggaran rutin dan anggaran untuk kegiatan Pemilu/Pilkada. Dengan terealisasinya anggaran Rencana Kerja tahun 2025 merupakan kunci kesuksesan dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kami sadar dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini belum sempurna, kami harap saran dan masukan dari pihak lain/ Bappeda sehingga kedepan dokumen Rencana Kerja ini lebih sempurna lagi.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretaris,



HINDAM AERI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002